

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan baru yang bermunculan dengan berbagai jenis dan spesifikasi usaha. Salah satu jenis badan usaha yang sukses dan dikenal luas di masyarakat adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang memiliki karakteristik yang unik, di mana anggotanya memiliki posisi yang setara dan memiliki kepentingan yang sama dalam menjalankan usaha bersama. Koperasi telah memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya, koperasi juga memiliki dampak sosial yang positif bagi masyarakat secara umum.

Saat ini, koperasi telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan tidak hanya hadir di kalangan masyarakat, tetapi juga di kantor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Koperasi karyawan dalam suatu perusahaan memiliki tugas tidak hanya untuk meningkatkan asetnya, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah. Koperasi adalah sebuah bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan berperan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan sektor produktif mereka guna meningkatkan kualitas hidup. Prinsip ini sejalan dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya, serta sebagai bagian integral dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan adil.

Koperasi juga berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi masyarakat dalam usaha mereka, dengan memberikan bantuan modal dan bantuan lainnya. Sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, di mana kekayaan anggota dipisahkan sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Dengan adanya peningkatan jumlah koperasi yang semakin pesat, persaingan antara koperasi menjadi lebih kompetitif. Hanya koperasi-koperasi yang memiliki kinerja yang baik yang akan mampu bertahan dalam pasar yang sangat ketat. Salah satu aspek yang kritis dan membutuhkan perhatian khusus adalah bidang keuangan, karena laporan keuangan menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengesahkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi koperasi simpan pinjam. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh koperasi, sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan baik dan benar. Peraturan tersebut menjelaskan dasar-dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Hal ini meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti, pengungkapan informasi yang relevan, serta metode pengukuran yang sesuai untuk mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tercipta standar yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam. Hal ini akan membantu memastikan keseragaman, keakuratan, dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat menjadi alat yang efektif dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengesahkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 3 disebutkan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi:

1. Standar Akuntansi keuangan Umum (SAK Umum).
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dirancang khusus untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki tingkat akuntabilitas publik yang signifikan. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki kewajiban signifikan untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka untuk pengguna eksternal secara umum. Pengguna eksternal ini termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Dalam konteks SAK ETAP, entitas akan dianggap memiliki akuntabilitas publik yang signifikan jika mereka telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan menerbitkan efek di pasar modal. Contoh entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan adalah bank, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. Sementara itu, entitas yang menguasai aset sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat juga termasuk dalam kategori entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan. Dengan demikian, SAK ETAP memberikan panduan dan prinsip akuntansi yang relevan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pengguna eksternal tertentu.

Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan SAK ETAP dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) setelah melakukan kajian bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis pada International Financial Reporting Standards (IFRS) sangat rumit dan dapat menghambat pengusaha skala kecil dan menengah. SAK ETAP dirancang dengan mengadopsi IFRS for SME (*International Financial Reporting Standards for Small*

*Medium Enterprises*) yang telah dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia dan disusun secara ringkas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai penyusunan laporan keuangan bagi koperasi, namun masih banyak koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masih banyak koperasi yang tidak mengikuti SAK ETAP. Menurut SAK ETAP terdapat lima laporan keuangan yang harus disajikan oleh suatu entitas, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, pada tahun 2020 sampai 2022 terdapat penurunan jumlah koperasi aktif yaitu dari 371 koperasi menjadi 315 koperasi, dengan kata lain sebanyak 56 koperasi dinonaktifkan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan serta kriteria koperasi yang sesuai. Dari hal ini bisa diartikan masih banyak koperasi yang mungkin akan terancam dinonaktifkan karena masih kurangnya sosialisasi dan bimbingan dalam mengembangkan koperasi sesuai regulasi yang berlaku serta bimbingan dalam melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk menyusun laporan keuangan dengan standar yang sudah ditetapkan, hal ini juga mendapat perhatian khusus dari bupati Kabupaten Bengkalis sehingga diadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan akses pembiayaan bagi koperasi tahun 2022 di ballroom hotel Bono. Dalam kegiatan tersebut bupati Kabupaten Bengkalis menyampaikan “berdasarkan laporan yang saya dapatkan, ada beberapa indikator yang menyebabkan kegagalan koperasi kita di Kabupaten Bengkalis, dalam membangun kemitraan dengan LPDP-KUMKM. Diantaranya, tidak melakukan RAT secara berturut-turut, usaha yang tidak jelas, laporan keuangan seperti neraca, arus kas dan SHU yang tidak lengkap serta legalitas usaha yang tidak ada atau tidak lengkap, seperti tidak memiliki izin usaha, NIB, NPWP dan lain-lainnya”. Sehingga hal ini dapat diartikan pentingnya sosialisasi dan pembinaan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya dalam pelaksanaan RAT, penyusunan laporan keuangan yang jelas sesuai standar yang berlaku dan bagaimana menentukan apakah informasi akuntansi dari laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi

karakteristik kualitatif yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Mengingat pentingnya penerapan akuntansi koperasi berdasarkan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi untuk meningkatkan penilaian terhadap koperasi tersebut, maka dari itu pengurus harus mengupayakan sebaik dan seoptimal mungkin penerapan akuntansi perkoperasian agar mampu berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan sebuah koperasi.

Dari data koperasi aktif yang sudah disajikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis terdapat salah satu koperasi yaitu Koperasi Perikanan Pantai Madani yang terletak di desa Pambang Pesisir kecamatan Bantan, menurut manager koperasi perikanan pantai madani, sejak tahun 2014 koperasi ini sudah menyusun laporan keuangan berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) yaitu neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan catatan atas laporan keuangan. Namun dalam penyusunannya belum dipaparkan standar apa yang digunakan dan belum diketahui apakah laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi karakteristik kualitatif informasi sesuai dengan SAK ETAP. Pada SAK ETAP dijelaskan bahwa terdapat sepuluh karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai acuan informasi dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini akan mengambil lima karakteristik kualitatif yang harus dimiliki sebuah laporan keuangan yaitu relevan, keandalan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan tepat waktu.

Berdasarkan paparan masalah tersebut, peneliti mengangkat judul **“Analisis Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Perikanan Pantai Madani Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis relevan?
2. Apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis terjamin keandalannya?
3. Apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis dapat dipahami?
4. Apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis dapat dibandingkan?
5. Apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis sudah disajikan tepat waktu?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan masalah lebih terarah, maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini hanya mengenai analisis karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada koperasi perikanan pantai madani, Bengkalis pada laporan keuangan tahun 2018-2022.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah informasi Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis relevan.
2. Untuk mengetahui apakah informasi Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis terjamin keandalannya.
3. Untuk mengetahui apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis dapat dipahami

4. Untuk mengetahui apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis dapat dibandingkan.
5. Untuk mengetahui apakah informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi Pantai Madani Bengkalis sudah disajikan tepat waktu.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi referensi dan menambah wawasan dalam perkembangan pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tentang akuntansi perkoperasian juga dapat menjadi sarana untuk penelitian lain yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang analisis karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi dalam mendapatkan gelar Sarjana Terapan bidang Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan tambahan referensi tentang sejauh mana suatu standar akuntansi telah disosialisasikan dan diterapkan, khususnya pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) tentang akuntansi perkoperasian.

- c. Bagi Koperasi Perikanan Pantai Madani, Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi apabila masih ada yang kurang atau belum diterapkannya standar keuangan koperasi yang sesuai.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**